



KONFERENSI PERS
**POKOK-POKOK
APBNP 2017**

JAKARTA, JULI 2017



KEMENTERIAN KEUANGAN

Pelaksanaan APBN Tahun 2017

APBN makin sehat, ekonomi makin kuat

Semester 1



**Belanja lebih efisien
dan lebih baik**



Pajak Meningkat

- Tumbuh sebesar 9,6% (negatif 2,4% pada th 2016), bahkan tanpa *tax amnesty* tetap tumbuh 5,6%).
- PPN tumbuh 13,5% (2016 : -3,1%)



**Ekonomi tumbuh
lebih tinggi**



**Tambahan utang
semakin menurun**



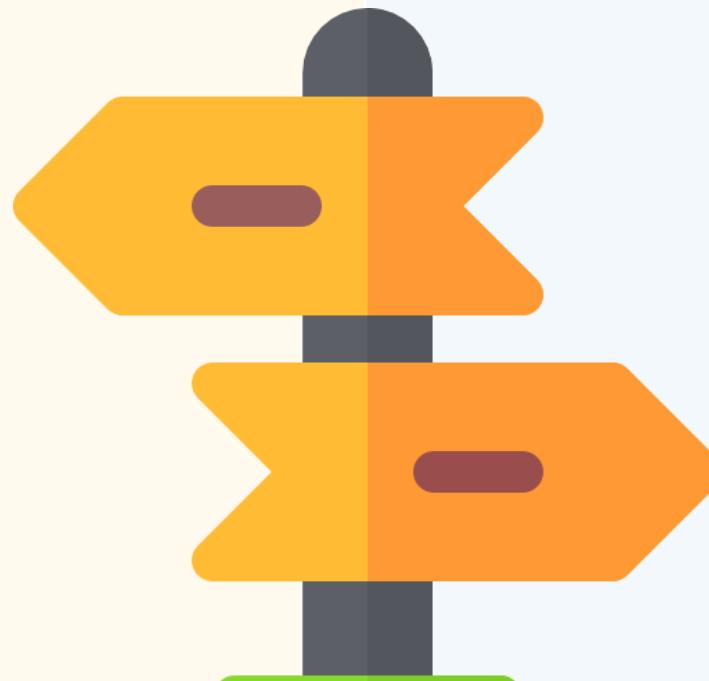
**Belanja mendesak
tetapi efisien dan efektif**



**Tambahan defisit dijaga,
utang terkendali**

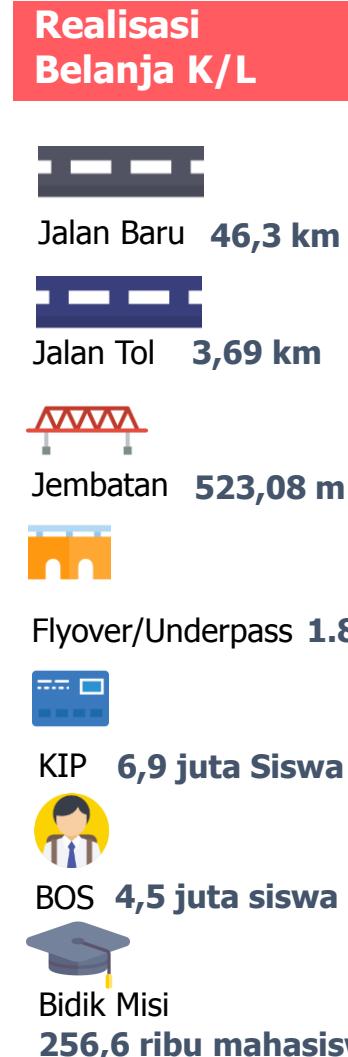
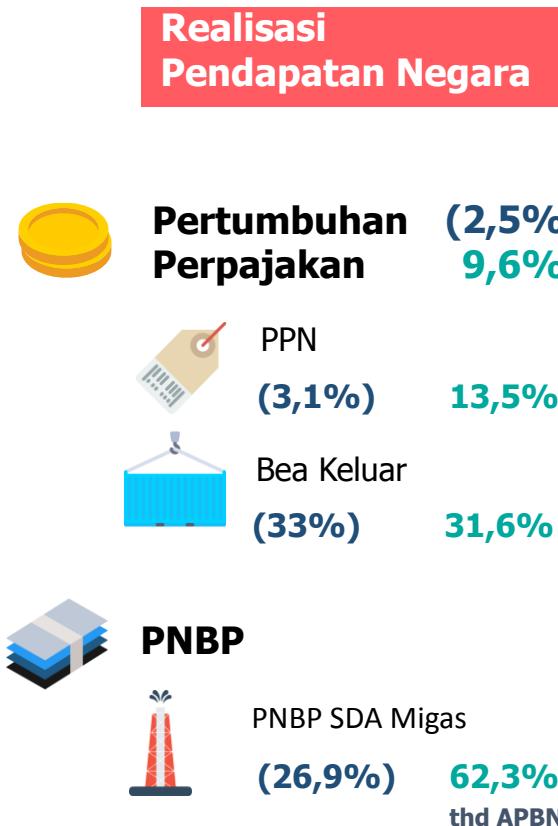


Ekonomi terjaga



Kinerja Pelaksanaan semester I APBN 2017 lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu

APBN tetap dijaga sebagai instrumen yang efektif dan kredibel untuk mencapai masyarakat adil dan makmur



- Realisasi Semester I 2016
- Realisasi Semester I 2017

APBNP 2017



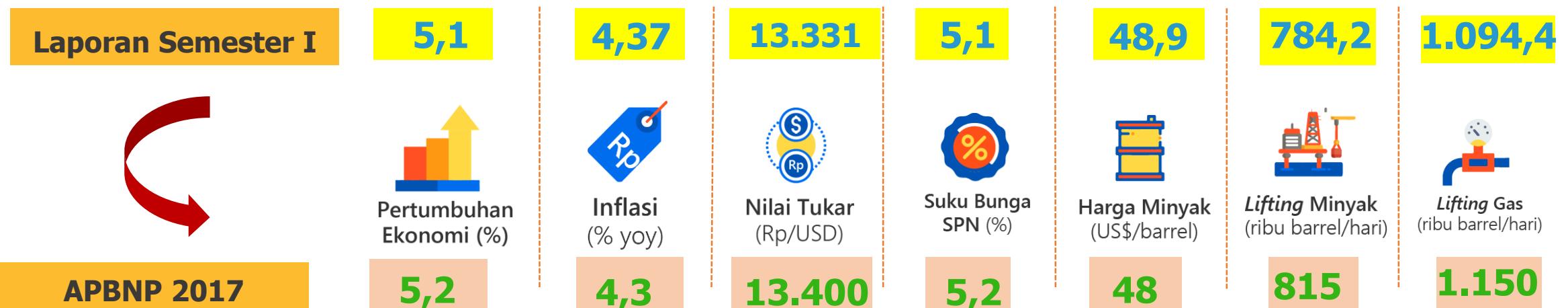
efisiensi dan kualitas
belanja prioritas
→ kemiskinan, kesenjangan, &
kesempatan kerja



Reformasi penerimaan
negara
→ Pajak & PNBP



Jaga momentum
ekonomi dan
kepercayaan rakyat



Asumsi Dasar Ekonomi Makro

ditetapkan realistik, mempertimbangkan perkembangan global dan domestik.

LAPORAN SEMESTER 1 TAHUN 2017

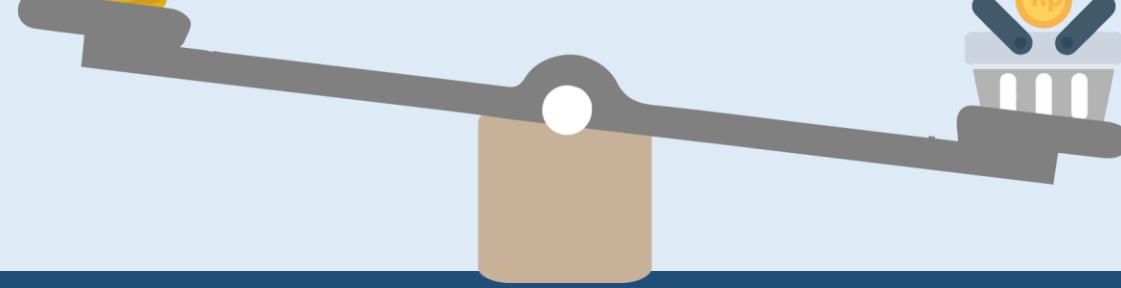
Pendapatan Negara

718,2



Belanja Negara

893,3



Defisit Anggaran
(175,1)



Keseimbangan Primer
(68,2)



Pembayaran Anggaran
209,4

Pembayaran Utang **207,8**
Pembayaran investasi **(0,1)**

APBNP TAHUN 2017

Pendapatan Negara

1.736,1



Belanja Negara

2.133,3

2.098,9
(outlook)



2,67%
(defisit outlook)



Defisit Anggaran
(397,2)
(362,9) → outlook



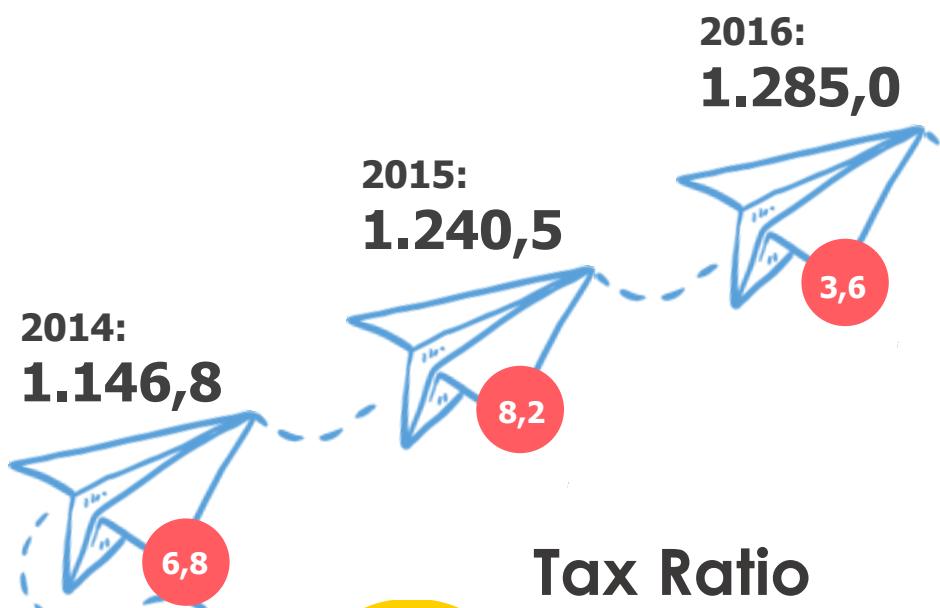
Pembayaran Anggaran
397,2
362,9 → outlook

Pembayaran Utang **461,3**
Pembayaran investasi **(65,2)**

Penerimaan Perpajakan Realistik

Target pertumbuhan penerimaan perpajakan dikoreksi turun menjadi 14,6% atau turun Rp26,2 T (namun tetap lebih tinggi dari pencapaian di tahun 2016 serta pertumbuhan sejak tahun 2012)

● Pertumbuhan Perpajakan (%)



Tax Ratio
11,5% PDB

Termasuk SDA migas & pertambangan

APBNP 2017:

Target (triliun rupiah)

1.472,7

Turun Rp26,2 T dari APBN 2017

14,6



1.241,8

Turun Rp29,9 T (-2,4%)
dari APBN 2017

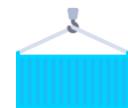


41,8

Naik Rp5,8 T
(16,2%) dari APBN
2017

PPh Migas

PPh Migas
ditargetkan naik
sebagai dampak
kenaikan harga
minyak



189,1

Turun Rp2,1 T (-1,1%)
dari APBN 2017

Pajak Nonmigas

Pertumbuhan Pajak nonmigas
didukung peningkatan ekonomi
dan Basis Pajak yang lebih baik
oleh kebijakan tax amnesty



Kepabeanan & Cukai

Penyesuaian turun
target Cukai oleh
berkurangnya
produksi rokok dan
belum dapat
dipungutnya sumber
cukai yang baru

Belanja Pemerintah Pusat diarahkan untuk **meningkatkan kualitas dari belanja negara**, baik dari aspek efisiensi anggaran maupun efektivitas pelaksanaannya, **menjaga *governance*** serta **mengamankan prioritas pembangunan.**



Perubahan belanja sebagai akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro



Perubahan belanja yang bersumber dari PNBP/BLU, PHLN/PHDN, SBSN PBS, dan realokasi BA BUN



Perubahan akibat efisiensi belanja barang



Perubahan beberapa komponen cadangan.



Tambahan belanja untuk kebutuhan mendesak dan untuk menyelesaikan kewajiban yang telah dilakukan

Belanja K/L & non K/L lebih berkualitas

Melanjutkan efisiensi belanja, *refocussing* pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial

Alokasi (triliun rupiah)
1.367,0

Naik Rp51,4 T dari APBN 2017



**Belanja K/L
798,6 T**

Naik Rp35,0 T dari APBN 2017

Perubahannya

 Efisiensi
-16,0 T

 Tambahan Belanja
11,7 T

 Tambahan Hasil
Pembahasan
25,5 T

Antara lain:

 Persiapan pelaksanaan
pemilu

 **Sertifikasi tanah.**

 Pengiriman Satgas Yonsit
TNI pada **Misi PBB**
Minusca ke Republik Afrika
Tengah

 Persiapan **Asian Games**
2018

 Perkembangan **pertanian**
& **hortikultura**



Antara lain:

 **Pembayaran
Bunga Utang**
219,2

Turun Rp2,0 T dari APBN 2017

 **Subsidi Energi**
89,9

Naik Rp12,5 T dari APBN 2017

 **Subsidi Nonenergi**
79,0

Turun Rp3,7 T dari APBN 2017

**Belanja Non K/L
568,4**

Naik Rp17,4 T dari APBN 2017

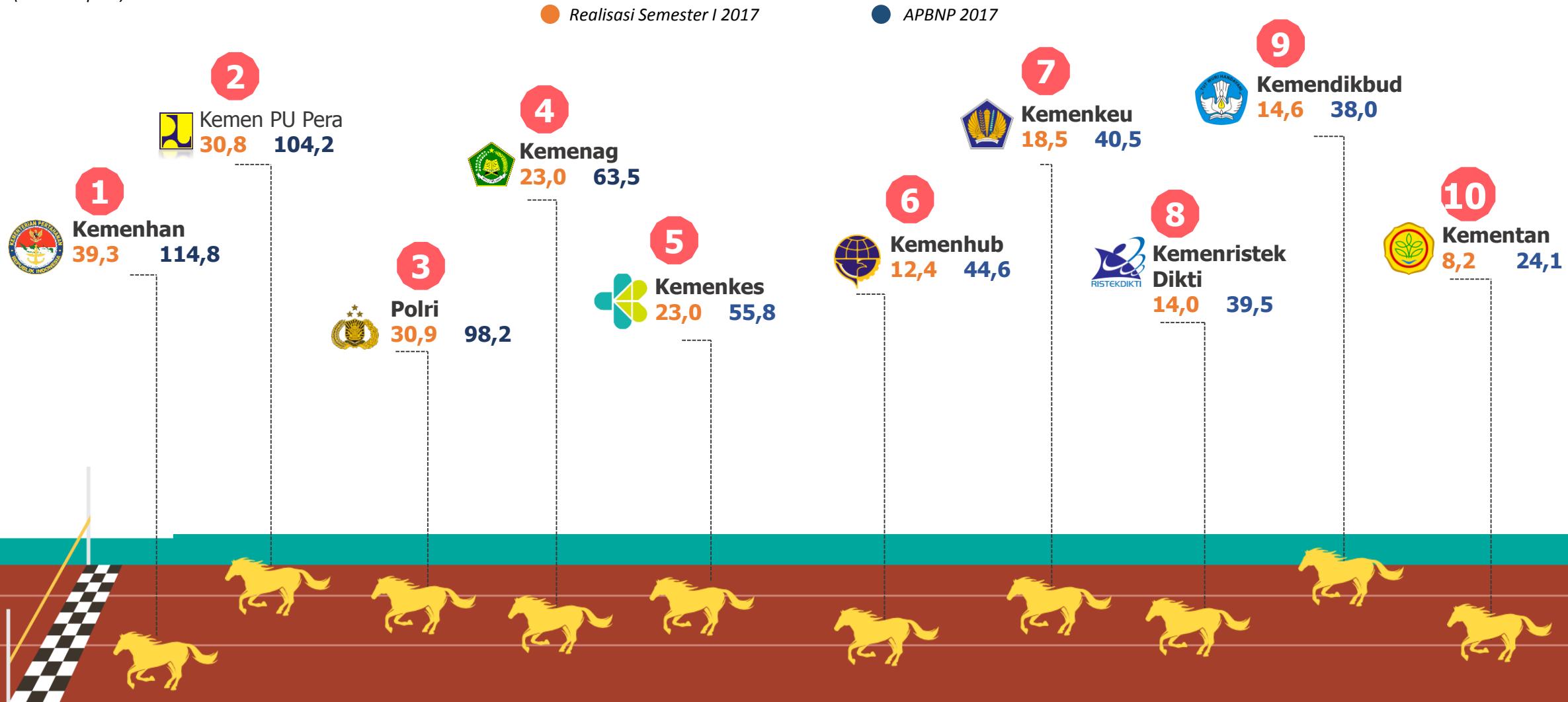
Perbaikan peringkat surat utang

Pemerintah Indonesia diharapkan memberi dampak positif terhadap penurunan yield SBN.

- **Subsidi lebih tepat sasaran**
- **Sinergi** antara subsidi, bansos, anggaran K/L, dan transfer ke daerah agar efektif dan terintegrasi

Realisasi Belanja 10 K/L besar dalam semester I 2017 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2016

(triliun Rupiah)



Realisasi Belanja Barang dan Modal K/L Semester I tahun 2017

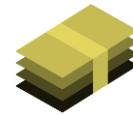
menunjukkan keberhasilan percepatan pelaksanaan anggaran
(triliun rupiah)

● Realisasi Semester I 2017

● APBPNP 2017



Belanja Pegawai
93,6 **220,4**



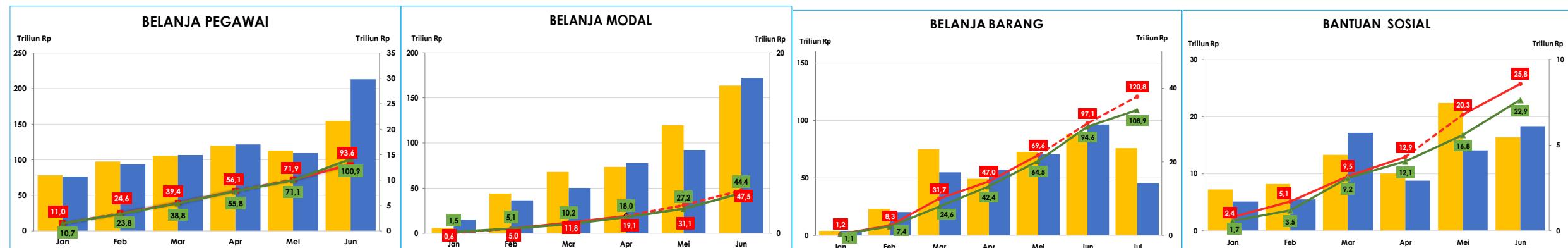
Belanja Modal
47,5 **206,2**



Belanja Barang
97,1 **318,3**



Belanja Bansos
25,8 **53,7**

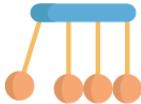


Tidak termasuk Belanja Pegawai Non-K/L (a.l.
pensiun, jaminan kesehatan, JKK, dan JKM) sebesar
Rp63,7 T di realisasi s.d 30 Juni 2017

2017 perkiraan bulanan (RHS)
2017 perkiraan akumulasi (LHS)

2016 bulanan (RHS)
2016 akumulasi (LHS)

Kesimpulan



Kinerja realisasi semester I membaik

harus dijaga dan ditingkatkan



Prioritas program harus semakin fokus

untuk penurunan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi



Penerimaan perpajakan harus terus dioptimalkan

dengan tetap menjaga iklim usaha



Outlook Defisit terjaga 2,67%

tambahan utang terukur untuk hal-hal yang produktif



Melanjutkan efisiensi belanja

menjaga governance serta sejalan dengan prioritas pembangunan



APBNP 2017 makin sehat, ekonomi makin kuat

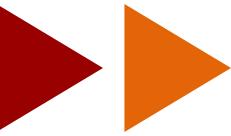




TERIMA KASIH



KEMENTERIAN KEUANGAN



Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBNP Tahun 2017

Indikator	2015	2016	2017		
	Realisasi	Realisasi	APBN	Realisasi Semester I	APBNP
a. Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)	4,9	5,0	5,1	5,1 *)	5,2
b. Inflasi (%, yoy)	3,4	3,0	4,0	4,37	4,3
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	6,0	5,7	5,3	5,1	5,2
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	13.392	13.307	13.300	13.331	13.400
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	49	40	45	48,9	48
f. <i>Lifting</i> Minyak (ribu barel per hari)	778	829	815	784,2 **)	815
g. <i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.195	1.180	1.150	1.094,4 **)	1.150

*) angka perkiraan

**) *lifting* migas periode Jan-Mei 2017



Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan (triliun Rupiah)	2016		2017			% thd APBN	growth (%)
	LKPP Audited	growth (%)	APBN	APBNP			
1. PPh MIGAS	36,1	(27,3)	35,9	41,8	116,2	15,7	
2. PAJAK NON MIGAS	1.069,9	5,8	1.271,7	1.241,8	97,6	16,1	
a. PPh Non Migas	630,1	14,0	751,8	742,2	98,7	17,8	
b. Pajak pertambahan nilai	412,2	(2,7)	493,9	475,5	96,3	15,3	
c. Pajak bumi dan bangunan	19,4	(33,5)	17,3	15,4	89,1	(20,7)	
d. Pajak lainnya	8,1	45,6	8,7	8,7	99,4	7,3	
3. KEPABEANAN DAN CUKAI	179,0	(0,3)	191,2	189,1	98,9	5,7	
a. Cukai	143,5	(0,8)	157,2	153,2	97,5	6,7	
b. Bea masuk	32,5	4,0	33,7	33,3	98,6	2,5	
c. Bea keluar	3,0	(19,5)	0,3	2,7	793,9	(10,0)	
JUMLAH	1.285,0	3,6	1.498,9	1.472,7	98,3	14,6	

Target Penerimaan Pajak Nonmigas disesuaikan turun Rp30 T agar lebih realistik, sejalan dengan pencapaian pada 2016 serta *effort* tahun 2017

1. PPh Migas ditargetkan naik sebagai dampak kenaikan harga minyak;
2. Pertumbuhan Pajak nonmigas didukung:
 - ✓ Peningkatan ekonomi
 - ✓ Basis Pajak yang lebih baik oleh kebijakan tax amnesty
 - ✓ Reformasi Perpajakan (regulasi, IT dan manajemen SDM/organisasi)
3. Penyesuaian turun target Cukai oleh berkurangnya produksi rokok dan belum dapat dipungutnya sumber cukai yang baru

PNBP
(triliun Rupiah)

	2016 LKPP Audited	2017		
		APBN	APBNP	% thd APBN
1. Pendapatan SDA	64,9	87,0	95,6	109,9
a. SDA Migas	44,1	63,7	72,2	113,3
- Minyak bumi	31,4	50,1	57,4	114,6
- Gas Bumi	12,6	13,6	14,8	108,7
b. Non Migas	20,8	23,3	23,4	100,6
- Pertambangan Minerba	15,8	17,7	17,9	100,7
- Panas Bumi	0,9	0,7	0,7	101,8
- Kehutanan	3,8	3,9	4,0	100,3
- Perikanan	0,4	1,0	1,0	100,0
2. Pendapatan Bagian Laba BUMN	37,1	41,0	41,0	100,0
3. PNBP Lainnya	118,0	84,4	85,1	100,7
4. Pendapatan BLU	41,9	37,6	38,5	102,5
JUMLAH	262,0	250,0	260,2	104,1

Target PNBP diperkirakan meningkat Rp10,2 T utamanya oleh kenaikan harga minyak

PNBP SDA Migas naik Rp8,5 T dipengaruhi oleh:

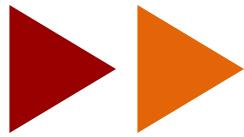
- perubahan ICP dari asumsi US\$45/barel menjadi US\$50/barel
- Nilai tukar rupiah melemah dari asumsi Rp13.300/US\$ menjadi Rp13.400/US\$

PNBP SDA Non Migas naik Rp0,1 T disebabkan tren kenaikan harga komoditas tambang

PNBP Lainnya naik Rp0,6 T, a.l. karena:

- Tambahan bagian Pemerintah dari surplus BI Rp1,7 T
- Pergeseran PNBP K/L menjadi Pendapatan BLU

PNBP Lainnya a.l. terdiri dari **PNBP K/L**, Penjualan Hasil Tambang (PHT) KESDM, dan Domestic Market Obligation.



Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat (triliun Rupiah)

	2016 LKPP Audited	2017 APBN	APBNP	% thd APBN
1. Belanja K/L	684,2	763,6	798,6	104,6
2. Belanja Non K/L	469,8	552,0	568,4	103,0
a.l. a. Pembayaran Bunga Utang	182,8	221,2	219,2	99,1
b. Subsidi	174,2	160,1	168,9	105,5
(1) Subsidi Energi	106,8	77,3	89,9	116,2
(2) Subsidi Non Energi	67,4	82,7	79,0	95,5
c. Belanja Lain-Lain	6,0	41,0	49,9	121,7
JUMLAH	1.154,0	1.315,5	1.367,0	103,9

Penghematan Belanja Barang K/L dilakukan, untuk direlokasi ke belanja yang mendesak & produktif

APBNP 2017

Belanja K/L naik Rp35,0 T karena:

- penghematan Belanja Barang K/L Rp16 T;
- Tambahan belanja prioritas K/L Rp11,7 T;
- Tambahan lainnya (PHLN, PNBP, BLU) Rp13,8 T.
- Tambahan Belanja Hasil Pembahasan Rp25,5 T.

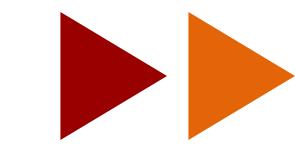
Belanja Non K/L naik Rp16,4 T karena:

- Kenaikan subsidi Rp8,8,1 T;
- Kenaikan hibah Rp3,3 T (a.l. realokasi dari cadangan bencana);
- Kenaikan belanja lain-lain Rp8,9 T.

Outlook 2017:

Belanja K/L turun Rp29,4 T karena alokasi anggaran yang tidak terserap secara alamiah (berdasarkan pola tahunan) sekitar 3-4% → realisasi 96-97% dari pagu

Subsidi



Subsidi (triliun Rupiah)	2016 LKPP Audited	2017 APBN	APBNP	% thd APBN
A. Subsidi Energi	106,8	77,3	89,9	116,2
1. Subsidi BBM & LPG	43,7	32,3	44,5	137,6
2. Subsidi Listrik	63,1	45,0	45,4	100,9
B. Subsidi Non Energi	67,4	82,7	79,0	95,5
1) Pangan	22,1	19,8	19,8	100,0
2) Pupuk	26,9	31,2	31,2	100,0
3) Benih	0,4	1,3	1,3	100,0
4) PSO	3,7	4,3	4,3	100,0
5) Subsidi Bunga Kredit Program	5,1	15,8	13,0	82,2
6) Subsidi Pajak / Pajak DTP	9,3	10,3	9,4	91,2
JUMLAH	174,2	160,1	168,9	105,5

→ Kenaikan Subsidi BBM & LPG :

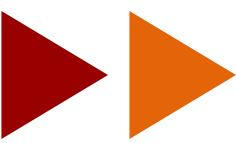
- a. Dampak Perubahan parameter subsidi → Rp4,6 T
- b. Penundaan penyesuaian harga jual eceran LPG tabung 3 kg Rp1.000/kg;
- c. Tidak berjalannya kebijakan pembatasan alokasi subsidi LPG tabung 3 Kg (distribusi tertutup) → Rp10 T
- d. Carry over Rp5,7 T.

→ Kenaikan Subsidi Listrik :

- Perubahan asumsi Rp1,4 T;
- pembatasan subsidi listrik untuk pelanggan RT 450 VA tidak berjalan → Rp3,9 T
- Alokasi untuk pembayaran kembali kepada pelanggan RT 900 VA yang layak menerima subsidi Rp1,7 T
- Carry over Rp5,6 T.

- Subsidi bunga kredit perumahan turun Rp1,7 T;
- Subsidi bantuan uang muka perumahan turun Rp1,0 T.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa



Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(triliun Rupiah)

	2016 LKPP Audited	2017			Outlook	% thd APBN
		APBN	APBNP	% thd APBN		
A. Transfer ke Daerah	663,6	704,9	706,3	100,2	697,7	99,0
1. Dana Perimbangan	639,8	677,1	678,6	100,2	669,9	98,9
a. Dana Transfer Umum	475,9	503,6	494,0	98,1	494,0	98,1
1) Dana Bagi Hasil	90,5	92,8	95,4	102,8	95,4	102,8
2) Dana Alokasi Umum	385,4	410,8	398,6	97,0	398,6	97,0
b. Dana Transfer Khusus	163,9	173,4	184,6	106,5	176,0	101,5
1) Dana Alokasi Khusus Fisik	75,2	58,3	69,5	119,2	66,6	114,2
2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik	88,7	115,1	115,1	100,0	109,3	95,0
2. Dana Insentif Daerah	5,0	7,5	7,5	100,0	7,5	100,0
3. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Y.	18,8	20,3	20,2	99,5	20,2	99,5
B. Dana Desa	46,7	60,0	60,0	100,0	58,2	97,0
JUMLAH	710,3	764,9	766,3	100,2	755,9	98,8

Perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa terutama dipengaruhi oleh turunnya Penerimaan DN Netto

APBNP 2017

Transfer ke Daerah dan Dana Desa naik Rp1,4 T karena:

- DAU tidak bersifat final (mengikuti perubahan pendapatan negara) → DAU turun Rp12,3 T;
- Peningkatan DBH karena menampung kurang bayar tahun 2015 Rp3 T;
- Peningkatan DAK Fisik Rp11,2 T, terutama untuk menampung kurang bayar DAK Fisik
- Penurunan Dana Otsus mengikuti penurunan DAU

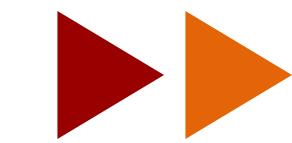
Outlook 2017

Transfer ke Daerah dan Dana Desa turun Rp10,5 T karena alokasi anggaran yang tidak terserap secara alamiah DAK sebesar 5% dan Dana Desa 3% → realisasi 95-97% dari pagu

Defisit APBNP 2017 diperkirakan 2,92% thd PDB, namun dengan adanya penghematan alamiah pada Belanja K/L, DAK, dan Dana Desa, maka defisit menjadi 2,67% thd PDB

APBN (triliun Rupiah)	2016 LKPP Audited	2017				
	APBN	APBNP	% thd APBN	Outlook	% thd APBN	
A. PENDAPATAN NEGARA	1.555,9	1.750,3	1.736,1	99,2	1.736,1	99,2
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.546,9	1.748,9	1.733,0	99,1	1.733,0	99,1
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.285,0	1.498,9	1.472,7	98,3	1.472,7	98,3
<i>Tax Ratio % (termasuk SDA migas & Pertambangan)</i>	10,84	11,5	11,5	99,6	11,5	99,64
a.l. PPh Non Migas	630,1	751,8	742,2	98,7	742,2	98,7
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	262,0	250,0	260,2	104,1	260,2	104,1
II. PENERIMAAN HIBAH	9,0	1,4	3,1	226,4	3,1	226,4
B. BELANJA NEGARA	1.864,3	2.080,5	2.133,3	102,5	2.098,9	100,9
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.154,0	1.315,5	1.367,0	103,9	1.343,1	102,1
1. Belanja K/L	684,2	763,6	798,6	104,6	769,2	100,7
2. Belanja Non K/L	469,8	552,0	568,4	103,0	573,9	104,0
a.l. a. Subsidi Energi	106,8	77,3	89,9	116,2	89,9	116,2
1) Subsidi BBM dan LPG	43,7	32,3	44,5	137,6	44,5	137,6
2) Subsidi Listrik	63,1	45,0	45,4	100,9	45,4	100,9
b. Belanja Lain-lain	6,0	41,0	49,9	121,7	56,0	136,7
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	710,3	764,9	766,3	100,2	755,9	98,8
1. Transfer ke Daerah	663,6	704,9	706,3	100,2	697,7	99,0
2. Dana Desa	46,7	60,0	60,0	100,0	58,2	97,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(125,6)	(109,0)	(178,0)	163,4	(144,3)	132,4
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(308,3)	(330,2)	(397,2)	120,3	(362,9)	109,9
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	(2,49)	(2,41)	(2,92)		(2,67)	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)	334,5	330,2	397,2	120,3	362,9	109,9
I. PEMBIAYAAN UTANG	403,0	384,7	461,3	119,9	427,0	111,0
a.l - Surat Berharga Negara (neto)	407,3	400,0	467,3	116,8	433,0	108,2
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(89,1)	(47,5)	(59,7)	125,8	(59,7)	125,8
III. PEMBERIAN PINJAMAN	1,7	(6,4)	(3,7)	57,2	(3,7)	57,2
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(0,7)	(0,9)	(1,0)	108,8	(1,0)	108,8
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	19,6	0,3	0,3	100,0	0,3	100,0

Pembiayaan Anggaran



Pembiayaan Anggaran (triliun Rupiah)	2016 LKPP Audited	2017		% thd APBN	Outlook	% thd APBN
		APBN	APBNP			
I. PEMBIAYAAN UTANG	403,0	384,7	461,3	119,9	427,0	111,0
a. Surat Berharga Negara (neto)	407,3	400,0	467,3	116,8	433,0	108,2
b. Pinjaman (neto)	(4,3)	(15,3)	(6,0)	39,0	(6,0)	39,0
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(89,1)	(47,5)	(59,7)	125,8	(59,7)	125,8
a. Investasi kepada BUMN	(50,5)	(4,0)	(6,4)	159,5	(6,4)	159,5
b. Investasi kepada Lembaga/Badan L	(10,8)	(6,8)	(3,2)	47,1	(3,2)	47,1
c. Investasi kepada BLU	(25,3)	(34,7)	(48,2)	138,8	(48,2)	138,8
a.I. 1. PPDPP	(4,3)	(9,7)	(3,1)	32,0	(3,1)	32,0
2. LMAN	(16,0)	(20,0)	(32,1)	160,3	(32,1)	160,3
3. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	(5,0)	(2,5)	(10,5)	420,0	(10,5)	420,0
d. Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha	(3,8)	(2,0)	(2,0)	100,8	(2,0)	100,8
III. PEMBERIAN PINJAMAN	1,7	(6,4)	(3,7)	57,2	(3,7)	57,2
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(0,7)	(0,9)	(1,0)	108,8	(1,0)	108,8
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	19,6	0,3	0,3	100,0	0,3	100,0
a. Saldo Anggaran Lebih	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b. Hasil Pengelolaan Aset	0,6	0,3	0,3	100,0	0,3	100,0
JUMLAH	334,5	330,2	397,2	120,3	362,9	109,9

Sejalan dengan pelebaran defisit APBNP 2017, SBN (neto) diperkirakan menjadi sekitar Rp433,0 T atau naik Rp33,0 T dengan asumsi ada penghematan alamiah

- **Pembiayaan Utang:**

Pinjaman neto menjadi sebesar Rp6,0 T, karena ada percepatan pembangunan infrastruktur.

- **Pembiayaan Investasi:**

✓ Investasi kepada BUMN naik Rp2,4 T menjadi Rp6,4 T karena PMN PT KAI Rp2,0 T dan PMN PT Jakarta Lloyd Rp379,3 M (non tunai).

✓ Investasi kepada BLU naik Rp13,5 T menjadi Rp48,2 T , a.I. karena:

❖ Penurunan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp6,6 T;

❖ Tambahan **LMAN** Rp12,1 T;

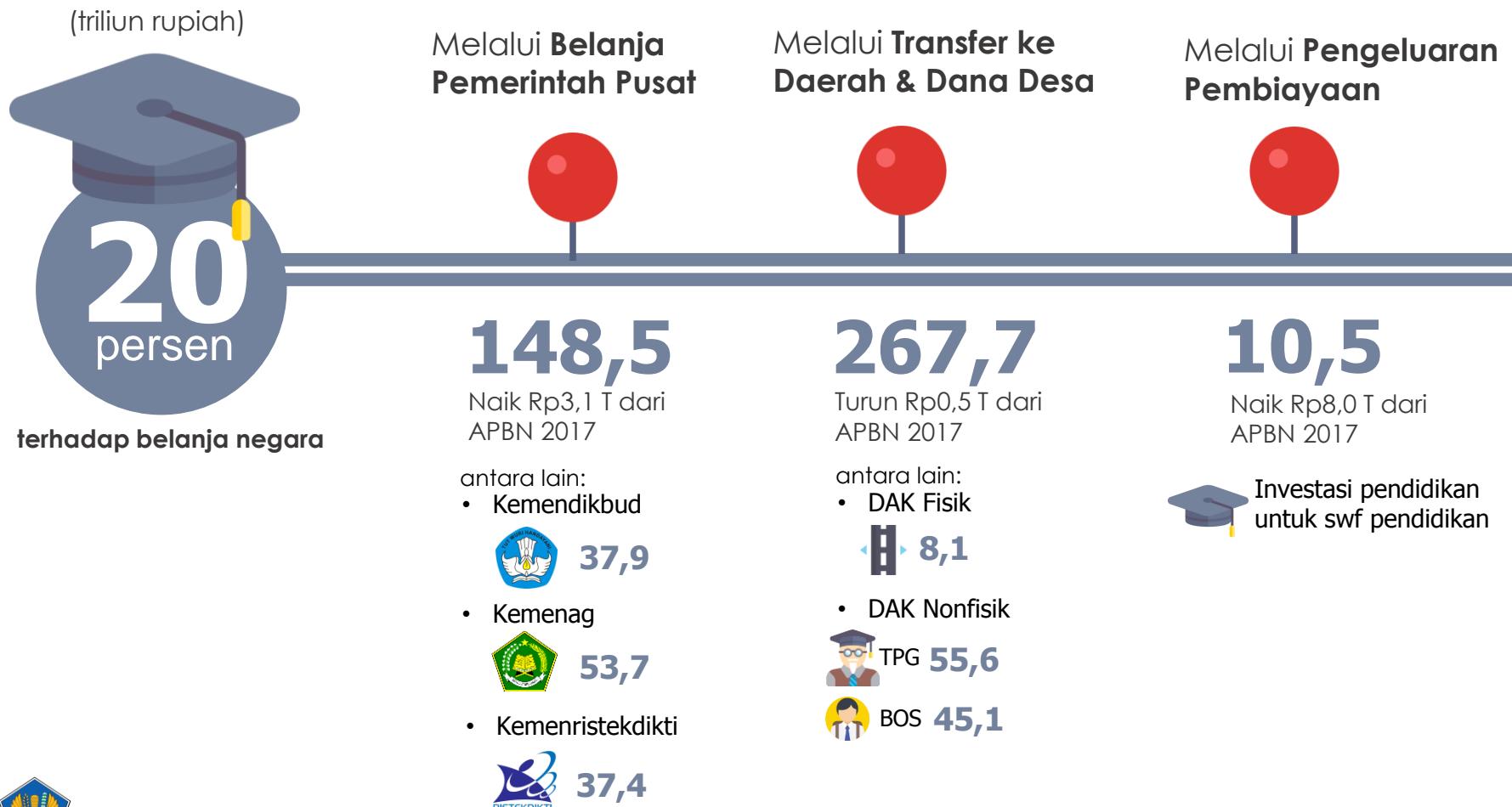
❖ Tambahan **DPPN** Rp8,0 T (untuk SWF Pendidikan).

- **Pemberian Pinjaman:**

Turun Rp2,7 T a.I karena penyesuaian pinjaman kepada pemprov DKI Jakarta (proyek MRT).

Anggaran Pendidikan tetap dijaga 20 persen

untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan



Alokasi (triliun rupiah)

426,7
(APBN: 416,1)

Perubahan anggaran pendidikan utamanya disebabkan:

1. Efisiensi belanja barang pada K/L bidang pendidikan;
2. Tambahan untuk kekurangan TPG Kementerian Agama;
3. Investasi dalam bentuk *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dalam rangka menjamin keberlangsungan pendidikan untuk generasi mendatang.

Anggaran Kesehatan sebesar 5 persen Belanja

terhadap APBN untuk meningkatkan supply side dan layanan, serta menjaga keberlanjutan JKN

Alokasi (triliun rupiah)

106,7
(APBN:104,0)

(triliun rupiah)



terhadap belanja negara

Melalui **Belanja Pemerintah Pusat**



81,5

Naik Rp6,2 T dari APBN 2017

antara lain:

- Kemenkes



- BPOM



- BKKBN



Melalui **Transfer ke Daerah & Dana Desa**



25,2

Turun Rp7,6 M dari APBN 2017

antara lain:

- DAK Kesehatan



- DAK BOK & BOKB



Perubahan anggaran kesehatan utamanya disebabkan:

1. Efisiensi belanja barang pada K/L bidang kesehatan;
2. Realokasi untuk defisit keuangan DJS-BPJS dari pembiayaan ke belanja.
3. Penyesuaian target PBI untuk direlokasi ke sarana dan prasarana kesehatan TNI/Polri

Media Indonesia 23
Februari 2016
“BKKBN Kekurangan
Petugas Penyuluhan KB”